

## PEREMPUAN DALAM RUANG KOMUNIKASI POLITIK: ANTARA REPRESENTASI, KEKUASAAN, DAN IDENTITAS GENDER

Oleh:

I Dewa Ayu Puspawati<sup>1</sup>, I Wayan Wastawa<sup>2</sup>, Gede Agus Siswadi<sup>3</sup>

UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar<sup>1,2</sup>, Samsara Institute<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Email: [idedewaayupuspawati@gmail.com](mailto:idedewaayupuspawati@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Naskah Masuk : 3 Oktober 2025

Naskah Direvisi : 19 November 2025

Naskah Disetujui : 27 November 2025

Tersedia Online : 31 Desember 2025

#### Keywords:

Women, Political Communication, Representation, Symbolic Power, Gender Identity, Patriarchy, Media

#### Kata Kunci:

Perempuan, Komunikasi Politik, Representasi, Kekuasaan Simbolik, Identitas Gender, Patriarki, Media



This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Samsara Publishing House

### ABSTRACT

*This article, Women in the Sphere of Political Communication: Between Representation, Power, and Gender Identity, aims to analyze how women are represented, positioned, and negotiate their identities within the predominantly masculine arena of political communication. The study draws on theories of representation (Stuart Hall), symbolic power (Pierre Bourdieu), and gender performativity (Judith Butler) to understand how language, symbols, and media construct the social identity of women in politics. Empirically, the limited representation of women in parliament, the gender-biased portrayal of female politicians in the media, and persistent gender stereotypes in public discourse indicate that political communication remains far from inclusive. Women's representation is often tokenistic used as a tool of legitimacy by political parties and constructed through patriarchal values that center men as the holders of authority. Nevertheless, women are not passive agents. Through social media and alternative communication strategies, they are beginning to build more autonomous and progressive political identities. The findings of this study highlight that political communication serves as an arena of meaning and power struggle, in which women continuously negotiate their roles and identities within masculine structures. Therefore, it is crucial to develop gender-just practices of political communication ones that not only provide representational space but also transform the underlying paradigm of power toward a more egalitarian, reflective, and transformative form of politics.*

### ABSTRAK

Artikel ini membahas Perempuan dalam Ruang Komunikasi Politik: Antara Representasi, Kekuasaan, dan Identitas Gender dengan tujuan menganalisis bagaimana perempuan direpresentasikan, diposisikan, dan menegosiasikan identitasnya dalam arena komunikasi politik yang masih dominan maskulin. Kajian ini berpijak pada teori representasi (Stuart Hall), kekuasaan simbolik (Pierre Bourdieu), serta performativitas gender (Judith Butler) untuk memahami bagaimana bahasa, simbol, dan media membentuk konstruksi sosial atas identitas perempuan dalam politik. Secara empiris, fenomena minimnya keterwakilan perempuan di parlemen, bias pemberitaan media terhadap politisi perempuan, serta stereotip gender dalam wacana publik menunjukkan bahwa komunikasi politik belum sepenuhnya

inklusif. Representasi perempuan sering kali bersifat tokenistik, dijadikan alat legitimasi partai politik, dan dikonstruksi melalui nilai-nilai patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas. Meskipun demikian, perempuan tidak pasif. Melalui media sosial dan strategi komunikasi alternatif, mereka mulai membangun citra politik yang lebih otonom dan progresif. Hasil kajian ini menegaskan bahwa komunikasi politik merupakan arena perebutan makna dan kekuasaan, di mana perempuan terus berupaya menegosiasikan peran serta identitasnya di tengah struktur yang maskulin. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan praktik komunikasi politik yang berkeadilan gender yang tidak hanya memberi ruang representasi, tetapi juga mengubah paradigma kekuasaan menuju politik yang lebih egaliter, reflektif, dan transformatif.

---

## **I. PENDAHULUAN**

Komunikasi politik merupakan arena penting dalam pembentukan opini publik, pemingkanaan isu, serta legitimasi kekuasaan. Melalui komunikasi, aktor politik tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk citra, memproduksi makna, dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap realitas politik. Dalam konteks demokrasi modern, komunikasi politik menjadi medan strategis tempat ide, nilai, dan kepentingan berkompetisi untuk memperoleh dukungan publik. Oleh karena itu, siapa yang memiliki akses, kontrol, dan kemampuan berkomunikasi politik akan lebih mudah mengendalikan arah kebijakan dan wacana publik (Hayat et al., 2021).

Meskipun ruang komunikasi politik terbuka secara formal bagi semua warga negara, dalam praktiknya perempuan sering kali menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara setara. Hambatan ini bersifat struktural seperti sistem politik yang masih didominasi oleh laki-laki; kultural yakni pandangan tradisional yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik; dan simbolik melalui bahasa, representasi media, serta stereotip gender yang membatasi citra perempuan sebagai pemimpin. Akibatnya, perempuan tidak hanya terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan, tetapi juga dari ruang simbolik di mana makna politik dikonstruksi dan diperdebatkan (Ma'mun, 2023).

Dalam konteks politik nasional, representasi perempuan masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Meskipun kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif telah diatur dalam kebijakan afirmatif, realitas menunjukkan bahwa jumlah tersebut belum sepenuhnya tercapai, dan peran perempuan sering kali masih bersifat simbolis. Dalam media massa, politisi perempuan kerap digambarkan melalui aspek-aspek personal seperti penampilan fisik, gaya komunikasi, atau kehidupan keluarga, ketimbang kapasitas intelektual dan kontribusi politiknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya diakui sebagai subjek politik yang otonom, melainkan sering dijadikan objek representasi yang diproduksi melalui sudut pandang patriarkal (Nurrohman et al., 2023).

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global. Dalam banyak negara, representasi perempuan di parlemen, lembaga eksekutif, maupun media politik masih terbatas. Misalnya, meskipun semakin banyak perempuan terpilih sebagai kepala daerah atau anggota parlemen, narasi yang mengiringi sering kali masih bias

gender, perempuan dipuji karena “kelembutan” atau “keibuan”-nya, bukan karena visi politik atau kapasitas kepemimpinannya. Bias ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik masih beroperasi dalam struktur simbolik yang meneguhkan dominasi maskulin.

Perkembangan media digital dan media sosial memberi peluang baru bagi perempuan untuk menembus dominasi struktur komunikasi politik konvensional. Melalui platform seperti Instagram, X (Twitter), atau TikTok, perempuan dapat membangun narasi politik sendiri, membentuk jejaring dukungan, dan berinteraksi langsung dengan publik tanpa harus melalui institusi media tradisional. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam dinamika komunikasi politik dari struktur vertikal yang elitis menuju ruang yang lebih horizontal dan partisipatif (Indrawan et al., 2023).

Peluang tersebut juga diiringi oleh tantangan baru. Media sosial tidak sepenuhnya bebas dari bias dan kekerasan simbolik berbasis gender. Banyak politisi perempuan menghadapi cyberbullying, body shaming, pelecehan verbal, hingga serangan digital yang bertujuan meruntuhkan kredibilitas mereka. Dengan demikian, meskipun ruang digital memberikan akses dan kebebasan baru, ia juga menciptakan bentuk-bentuk baru dari ketidaksetaraan komunikasi dan kekuasaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan dalam komunikasi politik bukan hanya persoalan representasi kuantitatif, tetapi juga tentang transformasi struktur makna, bahasa, dan relasi kuasa yang melingkupinya (Nurrohman et al., 2023).

Representasi perempuan dalam komunikasi politik tidak pernah netral, dan selalu diproduksi melalui lensa patriarki, estetika, dan stereotip gender yang telah berakar kuat dalam budaya politik dan media. Dalam banyak kasus, media masih menggambarkan politisi perempuan bukan karena gagasan dan integritas politiknya, melainkan karena faktor-faktor personal seperti penampilan, gaya berpakaian, atau status keluarga. Representasi semacam ini menegaskan bahwa tubuh perempuan sering kali menjadi medan simbolik di mana makna politik dinegosiasikan, bukan melalui intelektualitas atau kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, wacana tentang perempuan dalam politik kerap terperangkap dalam citra simbolik yang justru melanggengkan subordinasi gender.

Pertanyaan penting yang muncul adalah: apakah perempuan benar-benar dihadirkan sebagai subjek politik yang otonom, atau sekadar simbol keberagaman dan alat legitimasi kekuasaan? Dalam banyak kampanye politik, kehadiran perempuan sering digunakan sebagai strategi pencitraan untuk menunjukkan bahwa partai atau kandidat tertentu memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender. Namun di balik simbol itu, ruang pengambilan keputusan strategis sering masih didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian, representasi perempuan dalam komunikasi politik dapat menjadi paradoks: di satu sisi menampilkan citra inklusif, tetapi di sisi lain menutupi ketimpangan kekuasaan yang sesungguhnya.

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan arena perebutan makna dan kekuasaan. Michel Foucault menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui struktur formal, tetapi juga melalui wacana yakni cara berbicara, berpikir, dan memaknai realitas. Demikian pula Pierre Bourdieu melihat bahwa kekuasaan simbolik beroperasi melalui bahasa dan representasi yang dianggap “alami”. Dalam konteks ini, perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat, karena struktur komunikasi politik baik dalam media, partai, maupun lembaga pemerintahan masih dikendalikan oleh logika dan bahasa yang maskulin. Dengan demikian, perjuangan perempuan bukan hanya untuk mendapatkan ruang fisik dalam politik, tetapi juga untuk mengubah sistem makna yang mendefinisikan siapa yang layak dianggap “pemimpin”. Dalam praktiknya, perempuan yang memasuki

ruang politik kerap menghadapi bentuk-bentuk kekuasaan simbolik yang halus tetapi membatasi. Strategi komunikasi mereka sering diharuskan menyesuaikan diri dengan norma maskulin berbicara tegas, tampil rasional, dan menekan ekspresi emosional agar dianggap kompeten. Mereka juga sering mengalami double bind: jika terlalu lembut dianggap lemah, jika terlalu tegas dianggap agresif. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik masih beroperasi dalam kerangka patriarki yang mendefinisikan kepemimpinan berdasarkan standar laki-laki. Namun demikian, beberapa perempuan berhasil menegosiasikan posisi ini dengan membangun gaya komunikasi alternatif yang lebih empatik dan inklusif, menunjukkan bahwa kuasa simbolik selalu bisa dilawan melalui strategi wacana (Yoteni et al., 2023).

Identitas gender berperan penting dalam menentukan bagaimana perempuan tampil, berbicara, dan diterima di ruang politik. Identitas ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui bahasa, simbol, dan praktik komunikasi dalam masyarakat. Perempuan politisi sering kali dihadapkan pada ekspektasi ganda: mereka diharapkan menunjukkan kompetensi politik, tetapi juga menjaga citra feminin yang “layak”. Ketegangan antara dua tuntutan ini memperlihatkan bahwa identitas politik perempuan terbentuk dalam proses negosiasi yang kompleks antara ideal-ideal publik dan batas-batas kultural yang diwariskan. Oleh sebab itu, memahami komunikasi politik dari perspektif gender berarti menelaah bagaimana identitas ini diproduksi, dinegosiasikan, dan diartikulasikan di hadapan publik.

Kajian tentang perempuan dalam komunikasi politik menjadi sangat relevan untuk memperluas pemahaman kita mengenai relasi gender dalam wacana kekuasaan, terutama dalam konteks Indonesia yang masih dipengaruhi nilai-nilai patriarkal. Artikel ini berupaya mengungkap bagaimana perempuan bernegosiasi dengan kekuasaan simbolik dan membangun identitas politiknya di tengah struktur yang maskulin. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis posisi dan representasi perempuan dalam komunikasi politik dari perspektif gender. Adapun hal yang menjadi cakupan pembahasan dalam artikel ini yakni: (1) bagaimana perempuan direpresentasikan dalam komunikasi politik; (2) bagaimana relasi kuasa membentuk identitas politik perempuan; dan (3) bagaimana perempuan memanfaatkan ruang komunikasi untuk menegosiasikan kekuasaan dan identitasnya. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap upaya mewujudkan ruang politik yang lebih setara dan inklusif bagi perempuan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana kritis, karena fokus utama kajian adalah mengungkap bagaimana representasi, relasi kuasa, dan konstruksi identitas gender perempuan diproduksi dalam praktik komunikasi politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah bahasa, simbol, dan narasi yang digunakan dalam berbagai media politik, baik media massa, media sosial, maupun ruang komunikasi politik formal. Analisis wacana kritis dipilih karena memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana bahasa menjadi instrumen kekuasaan yang membentuk pandangan masyarakat tentang perempuan dan politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena komunikasi, tetapi juga membongkar struktur ideologis yang melatarbelakanginya. Hasil analisis data dalam penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana representasi perempuan tidak sekadar persoalan bahasa, melainkan juga bentuk reproduksi dan negosiasi kekuasaan dalam ruang publik politik kontemporer.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Representasi Perempuan dalam Wacana Komunikasi Politik

Konsep *representasi* dalam kajian komunikasi dan budaya, sebagaimana dijelaskan oleh Stuart Hall, tidak dipahami sebagai cerminan langsung dari realitas, melainkan sebagai proses konstruksi makna. Representasi adalah cara bagaimana makna diproduksi dan dipertukarkan melalui bahasa, simbol, dan praktik sosial. Dalam pandangan Hall, media, bahasa, dan citra bukanlah saluran pasif yang merekam kenyataan, tetapi alat aktif yang membentuk bagaimana realitas dimaknai. Artinya, ketika media menampilkan seseorang, kelompok, atau isu politik tertentu, mereka tidak hanya “melaporkan” fakta, tetapi juga menanamkan ideologi tertentu melalui pilihan kata, gambar, dan narasi. Dengan demikian, representasi menjadi ruang penting bagi pembentukan kesadaran sosial, termasuk mengenai peran dan posisi perempuan dalam politik (Noor et al., 2022).

Dalam konteks komunikasi politik, representasi berfungsi sebagai arena simbolik di mana identitas, kekuasaan, dan ideologi berinteraksi. Bagaimana perempuan digambarkan dalam wacana politik bukanlah sesuatu yang netral, melainkan mencerminkan struktur nilai dan relasi kekuasaan yang mendasari masyarakat. Representasi perempuan dalam politik sering kali merefleksikan pandangan dominan tentang peran gender di mana laki-laki diposisikan sebagai agen rasional dan pengambil keputusan, sementara perempuan diidentikkan dengan kelembutan, emosi, atau moralitas. Cara pandang ini tidak hanya mempengaruhi persepsi publik terhadap politisi perempuan, tetapi juga menentukan seberapa besar ruang simbolik yang bisa mereka tempati dalam komunikasi politik (Antari, 2023).

Media massa memiliki peran sentral dalam proses konstruksi representasi tersebut. Melalui berita, wawancara, dan liputan kampanye, media turut membentuk citra politisi perempuan: bagaimana mereka berbicara, berpakaian, dan bahkan bagaimana ekspresi wajah mereka dinilai publik. Dalam banyak kasus, media lebih menyoroti aspek personal dan penampilan dibandingkan gagasan dan kapasitas intelektualnya. Representasi semacam ini memperlihatkan bahwa media bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga aktor ideologis yang turut menentukan batas-batas legitimasi politik bagi perempuan. Dengan kata lain, media berperan aktif dalam mendefinisikan siapa yang dianggap pantas menjadi pemimpin, siapa yang layak berbicara, dan bagaimana perempuan seharusnya tampil di ruang publik.

Selain media, aktor politik seperti partai, lembaga legislatif, dan tokoh publik juga turut menciptakan konstruksi representasi perempuan. Partai politik, misalnya, sering menempatkan perempuan dalam posisi simbolik untuk memenuhi kuota keterwakilan, namun tidak selalu memberi ruang bagi mereka untuk menentukan arah kebijakan atau

strategi komunikasi partai. Dalam kampanye politik, citra perempuan sering dimanfaatkan untuk menunjukkan wajah “lembut”, “bersih”, atau “peduli rakyat”, tanpa memberi ruang bagi kompleksitas identitas mereka sebagai individu yang berdaya dan berwawasan politik. Dengan demikian, representasi perempuan dalam komunikasi politik mencerminkan pertarungan antara ideologi patriarkal yang masih dominan dan upaya perempuan untuk menegosiasikan posisi serta maknanya sendiri di ruang kekuasaan.

Representasi perempuan dalam praktik komunikasi politik tidak terlepas dari dinamika kekuasaan dan ideologi yang bekerja di balik proses produksi pesan. Dalam konteks politik kontemporer, perempuan sering kali ditampilkan sebagai simbol moralitas, keanggunan, atau bahkan pelengkap citra partai yang ingin tampak inklusif. Citra-citra semacam ini bukanlah representasi yang netral, melainkan hasil konstruksi sosial yang diproduksi melalui bahasa, narasi, dan strategi komunikasi yang sarat dengan kepentingan ideologis. Dengan demikian, representasi perempuan dalam ruang politik tidak hanya berbicara tentang “kehadiran” perempuan, tetapi juga tentang bagaimana kehadiran itu dimaknai dan digunakan untuk tujuan politik tertentu. Dalam kampanye politik, misalnya, perempuan kerap dihadirkan dalam peran-peran yang menonjolkan sisi emosional, empati, atau peran domestik mereka. Perempuan politisi sering diposisikan sebagai “ibu bangsa” atau “sosok lembut” yang membawa keseimbangan di tengah kerasnya dunia politik. Narasi semacam ini tampak positif di permukaan, tetapi sejatinya dapat membatasi perempuan pada kerangka gender tradisional yang menekankan feminitas sebagai nilai utama. Dengan kata lain, representasi tersebut berpotensi memperkuat stereotip bahwa perempuan yang ideal dalam politik adalah mereka yang tetap menjaga peran tradisionalnya, bukan mereka yang berani menantang tatanan patriarkal (Munggaran, 2023).

Selain itu, media massa memiliki peran yang sangat besar dalam mereproduksi atau menantang representasi gender tersebut. Media sering kali lebih menyoroti penampilan, gaya berpakaian, atau status keluarga seorang politisi perempuan ketimbang gagasan dan kebijakannya. Liputan yang bersifat sensasional dan gendered ini memperlihatkan bahwa komunikasi politik masih sangat dipengaruhi oleh bias patriarkal. Namun, di sisi lain, beberapa media dan platform alternatif kini mulai berupaya memberikan ruang representasi yang lebih adil, dengan menampilkan perempuan sebagai subjek politik yang rasional, kritis, dan memiliki visi politik yang kuat. Dalam era digital, media sosial menjadi ruang baru di mana perempuan dapat mengonstruksi dan mengartikulasikan identitas politiknya secara lebih otonom. Melalui platform seperti Instagram, X (Twitter), atau YouTube, perempuan politisi dapat berkomunikasi langsung dengan publik tanpa melalui filter media arus utama. Namun, ruang digital ini juga menghadirkan paradoks: di satu sisi membuka peluang bagi

representasi alternatif, tetapi di sisi lain memperkuat bentuk-bentuk baru kekerasan simbolik dan pelecehan berbasis gender. Oleh karena itu, analisis representasi perempuan dalam komunikasi politik perlu memahami kedua sisi ini baik sebagai strategi resistensi maupun sebagai arena reproduksi kekuasaan patriarkal yang terus bertransformasi (Setiawan, 2018; Zamroni, 2013).

Media massa memiliki peran besar dalam membentuk citra politik perempuan melalui proses framing yang sering kali bias gender. Dalam pemberitaan politik, politisi perempuan kerap dibingkai bukan berdasarkan kapasitas intelektual, visi, atau kebijakan yang mereka tawarkan, melainkan pada aspek personal seperti penampilan fisik, gaya berpakaian, ekspresi wajah, bahkan status pernikahan. Ketika seorang politisi perempuan tampil di depan publik, sering kali komentar media justru berfokus pada “betapa anggunnya ia berdandan” atau “betapa lembut cara bicaranya”, sementara gagasan politiknya tenggelam di balik sorotan estetika. Pembungkai seperti ini secara tidak langsung menegaskan bahwa perempuan dalam politik tetap dilihat melalui kacamata domestik dan estetis, bukan profesional dan intelektual. Stereotip gender dalam media juga memperkuat dikotomi antara sifat-sifat “feminin” dan “maskulin” yang dilekatkan pada politisi perempuan dan laki-laki. Perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang lembut, penyayang, dan emosional, sedangkan laki-laki digambarkan tegas, rasional, dan berwibawa. Pola representasi ini mengukuhkan pandangan bahwa dunia politik yang identik dengan logika, debat, dan kekuasaan adalah ruang yang lebih sesuai untuk laki-laki. Ketika perempuan menunjukkan ketegasan atau keberanian politik, media kadang menilainya sebagai “terlalu agresif” atau “tidak sesuai kodrat”, sehingga menciptakan paradoks antara ekspektasi sosial terhadap feminitas dan tuntutan kepemimpinan dalam politik (Setiawan, 2018).

Akibat konstruksi tersebut, ruang perempuan untuk tampil sebagai pemimpin politik yang berwibawa menjadi terbatas. Persepsi publik yang telah terbentuk melalui representasi media membuat perempuan harus bernegosiasi dengan dua identitas: sebagai perempuan yang diharapkan tampil lembut, dan sebagai politisi yang dituntut tegas serta rasional. Situasi ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang sulit, di mana setiap tindakan komunikatif mereka mudah ditafsirkan secara stereotipikal. Dengan demikian, analisis citra politik perempuan dalam media bukan sekadar persoalan citra publik, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang mempertahankan ketimpangan gender dalam struktur kekuasaan politik (Noviasari, 2022).

Berikutnya, dalam praktik politik kontemporer, representasi perempuan sering digunakan sebagai alat legitimasi bagi partai politik untuk menunjukkan citra modern, inklusif, dan progresif. Kehadiran perempuan dalam kampanye atau daftar calon legislatif

kerap dijadikan simbol komitmen terhadap kesetaraan gender, meskipun tidak selalu diiringi dengan pemberian ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Partai-partai politik menampilkan figur perempuan dalam baliho, iklan, atau acara publik untuk memperkuat kesan bahwa mereka mendukung demokrasi yang berkeadilan gender. Namun, di balik simbolisme ini, struktur internal partai sering tetap didominasi oleh laki-laki yang memegang kendali utama atas strategi, wacana, dan arah kebijakan politik.

Representasi semacam ini sering kali bersifat tokenistik, yakni menghadirkan perempuan hanya untuk memenuhi kuota atau sebagai elemen pencitraan, bukan karena pengakuan atas kapasitas dan kompetensi mereka. Tokenisme membuat perempuan hadir di permukaan tetapi tidak memiliki kekuatan substansial dalam menentukan arah politik. Dalam banyak kasus, perempuan ditempatkan di posisi “pelengkap” sebagai wakil yang melambangkan keberagaman, bukan sebagai aktor yang memiliki pengaruh strategis. Fenomena ini memperlihatkan bahwa representasi tidak selalu identik dengan partisipasi bermakna; kehadiran perempuan dalam politik bisa saja menjadi mekanisme simbolik untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan patriarkal (Wahyudi, 2019).

Hal ini memunculkan pertanyaan reflektif yang penting: apakah meningkatnya jumlah perempuan dalam politik benar-benar mencerminkan perubahan struktur kekuasaan, ataukah hanya kosmetik politik yang mempercantik wajah demokrasi? Apakah representasi perempuan sekadar berfungsi sebagai strategi elektoral untuk menarik simpati pemilih perempuan, ataukah menjadi langkah nyata menuju redistribusi kekuasaan yang lebih adil? Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa demokrasi yang sejati bukan hanya tentang keterwakilan angka, tetapi tentang transformasi struktur sosial dan politik yang memungkinkan perempuan menjadi subjek aktif dalam produksi kebijakan dan wacana publik (Aula M Rizki, 2023).

Meskipun sering mengalami bias dan marginalisasi dalam representasi politik, perempuan tidak sepenuhnya menjadi korban dari sistem yang patriarkal. Banyak politisi perempuan kini mulai menciptakan wacana tandingan yang menantang cara lama media dan politik memandang mereka. Dengan memanfaatkan ruang komunikasi publik dan media sosial, mereka mengonstruksi citra diri secara lebih otonom sebagai pemimpin yang cerdas, empatik, berprinsip, dan independen. Melalui narasi personal, kampanye digital, dan strategi komunikasi berbasis nilai, perempuan mampu menggeser citra tradisional yang menempatkan mereka sebagai figur pendamping atau simbol moralitas, menjadi figur yang berdaya dan rasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam komunikasi politik bersifat dinamis dan terus berubah. Ia bukan sekadar hasil konstruksi pihak lain, melainkan



juga arena negosiasi makna di mana perempuan aktif membentuk dan merebut kembali identitas politik mereka. Di satu sisi, kekuasaan patriarkal terus berupaya mempertahankan hegemoni simbolik melalui wacana dan representasi yang bias. Namun di sisi lain, perempuan mengembangkan bentuk-bentuk resistensi yang kreatif baik melalui humor, narasi inspiratif, maupun solidaritas digital untuk mendekonstruksi stereotip dan menegaskan eksistensi mereka sebagai subjek politik yang sejajar. Dengan demikian, analisis representasi perempuan dalam komunikasi politik tidak hanya berbicara tentang bagaimana perempuan “ditampilkan”, tetapi juga tentang bagaimana mereka menampilkan diri. Perempuan kini menjadi agen aktif dalam mendefinisikan ulang makna kepemimpinan, kekuasaan, dan feminitas di ruang publik. Transformasi ini memperlihatkan bahwa resistensi terhadap patriarki tidak selalu terjadi melalui konfrontasi langsung, tetapi bisa juga melalui strategi komunikasi yang cerdas dan reflektif membangun makna baru tentang perempuan, kekuasaan, dan politik yang lebih setara.

### **3.2 Komunikasi Politik dan Relasi Kekuasaan yang Maskulin**

Komunikasi politik pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan antara aktor politik dan publik, tetapi juga sebagai arena produksi dan perebutan makna kekuasaan. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak semata-mata berada di tangan individu atau institusi, melainkan tersebar dalam jaringan diskursus yang membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Artinya, komunikasi politik menjadi ruang di mana wacana-wacana tertentu dilegitimasi, sementara yang lain disingkirkan. Begitu pula Pierre Bourdieu melihat komunikasi politik sebagai praktik sosial yang sarat dengan modal simbolik, di mana bahasa dan gaya komunikasi menjadi alat untuk mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan yang ada.

Dalam konteks ini, bahasa, simbol, dan narasi politik memainkan peran penting dalam membentuk hierarki sosial, termasuk dalam mengatur posisi laki-laki dan perempuan di dalam sistem politik. Bahasa politik yang digunakan dalam media, pidato, maupun perdebatan publik sering kali mengandung bias gender, yang secara halus menegaskan dominasi laki-laki sebagai pemegang otoritas. Narasi-narasi seperti “pemimpin kuat”, “tegas”, atau “rasional” lebih sering dilekatkan pada laki-laki, sementara perempuan digambarkan dengan istilah “lembut”, “penyayang”, atau “emosional”. Dengan demikian, komunikasi politik berfungsi bukan hanya untuk menyampaikan ide, tetapi juga untuk mereproduksi norma-norma sosial dan ideologi patriarkal yang mendukung struktur kekuasaan maskulin (Aula M Rizki, 2023).

Kekuasaan dalam komunikasi politik bersifat simbolik, ia tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan fisik, tetapi dalam kemampuan menentukan siapa yang boleh berbicara, apa yang dianggap penting, dan bagaimana suatu isu disebarkan serta dipahami publik. Dalam struktur yang maskulin, laki-laki sering kali menjadi subjek dominan dalam wacana politik, sementara perempuan harus berjuang keras agar suaranya diakui dan dianggap sah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik adalah medan pertarungan yang tidak netral, di mana setiap kata, citra, dan strategi komunikasi dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan atau menantang hegemoni kekuasaan yang patriarkal.

Dunia politik secara historis dibangun di atas norma-norma maskulinitas yang mengutamakan rasionalitas, kompetisi, kekuatan, dan agresivitas sebagai nilai utama dalam kepemimpinan. Ciri-ciri ini dianggap sebagai atribut ideal bagi seorang pemimpin, sementara nilai-nilai yang diasosiasikan dengan feminitas seperti empati, kelembutan, dan kepekaan emosional sering kali diremehkan atau dianggap tidak relevan dengan dunia politik yang keras. Akibatnya, sistem politik secara kultural dan simbolik didefinisikan dengan bahasa, nilai, dan logika maskulin, yang kemudian menjadi ukuran universal dalam menilai kredibilitas dan otoritas seorang aktor politik. Dalam konteks ini, perempuan yang masuk ke dunia politik harus bernegosiasi dengan norma-norma maskulin tersebut agar dapat diterima. Ketika perempuan tampil tegas dan vokal dalam memperjuangkan gagasannya, mereka kerap dianggap “terlalu agresif” atau “tidak feminin.” Sebaliknya, ketika mereka menampilkan kelembutan dan empati, dianggap “tidak kuat secara politik.” Paradoks ini menciptakan dilema identitas bagi politisi perempuan: di satu sisi mereka dituntut menyesuaikan diri dengan model kepemimpinan maskulin, tetapi di sisi lain diharapkan tetap mematuhi norma feminitas tradisional. Dengan demikian, perempuan berada dalam posisi yang serba salah di mana setiap tindakan komunikatif mereka dinilai berdasarkan standar ganda gender (Mandasari, 2023).

Budaya politik yang keras dan hierarkis memperkuat tantangan ini dengan menciptakan penghalang simbolik bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara. Struktur organisasi politik yang berbasis pada kompetisi dan loyalitas serta jaringan kekuasaan yang didominasi laki-laki membatasi ruang bagi perempuan untuk membangun otoritas politiknya. Di banyak partai, perempuan hanya diberi peran administratif atau simbolik, sementara pengambilan keputusan strategis tetap didominasi oleh elite laki-laki. Hambatan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural: dalam pertemuan politik, gaya komunikasi laki-laki yang keras dan langsung lebih dihargai dibandingkan gaya komunikatif perempuan yang cenderung dialogis atau kolaboratif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik masih menjadi ruang dominasi simbolik, di mana bahasa dan gaya komunikasi laki-laki dianggap lebih rasional, objektif, dan kredibel. Representasi laki-laki sebagai “pemimpin alami” terus direproduksi melalui media, diskursus publik, dan praktik politik sehari-hari. Dalam banyak kasus, bahkan ketika perempuan berhasil menduduki jabatan politik, mereka tetap harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang sama dengan rekan laki-laki mereka. Dominasi maskulinitas ini membuat komunikasi politik bukan sekadar arena pertukaran ide, tetapi juga medan kuasa di mana identitas gender diuji, dinegosiasikan, dan sering kali disubordinasikan.

Secara lebih luas, situasi ini memperlihatkan bagaimana politik sebagai institusi sosial mencerminkan struktur patriarki yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Nilai-nilai maskulin yang dilegitimasi sebagai standar kepemimpinan menciptakan hierarki simbolik yang meminggirkan pengalaman, perspektif, dan cara komunikasi perempuan. Untuk mengubah keadaan ini, perlu ada upaya dekonstruksi terhadap narasi kepemimpinan yang bias gender, serta pengakuan bahwa keberagaman gaya komunikasi dan nilai-nilai feminitas seperti empati, kolaborasi, dan keadilan relasional juga merupakan kekuatan politik yang penting bagi demokrasi yang lebih inklusif dan setara.

### **3.4 Identitas Gender dan Negosiasi Peran Politik Perempuan**

Identitas gender tidak muncul secara alamiah, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses komunikasi, bahasa, dan budaya. Sejak kecil, individu diajarkan bagaimana “menjadi laki-laki” atau “menjadi perempuan” melalui sosialisasi dalam keluarga, pendidikan, dan media. Nilai-nilai yang diserap ini kemudian menciptakan standar perilaku yang dianggap “sesuai” dengan jenis kelamin tertentu, sehingga membatasi ekspresi dan peran sosial seseorang dalam ruang publik, termasuk dalam dunia politik. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinat melalui ekspektasi sosial yang menekankan kelembutan, kepasrahan, dan peran domestik. Citra ideal ini secara halus membentuk pandangan publik bahwa kepemimpinan adalah ranah laki-laki, karena dianggap lebih rasional, tegas, dan kuat. Akibatnya, ketika perempuan mencoba keluar dari batas-batas tersebut misalnya dengan bersikap tegas dalam politik, kerap kali mendapat penilaian negatif sebagai “tidak feminin” atau “melawan kodrat” (Gusmansyah, 2019).

Konstruksi sosial ini juga berpengaruh terhadap bagaimana perempuan menampilkan diri dalam ruang politik. Mereka sering kali harus berstrategi untuk menyeimbangkan antara ekspektasi sosial dan tuntutan politik, misalnya dengan menampilkan citra “ibu bangsa” yang peduli, namun tetap kompeten secara politik. Representasi ini memperlihatkan bagaimana identitas gender selalu dinegosiasikan dalam konteks kekuasaan dan komunikasi publik.

Judith Butler, dalam teorinya tentang performativitas gender, menegaskan bahwa gender bukanlah esensi yang tetap, melainkan hasil dari tindakan-tindakan berulang yang membentuk identitas sosial seseorang. Dengan demikian, identitas gender dapat diartikulasikan ulang melalui praktik dan bahasa politik. Perempuan dalam politik memiliki peluang untuk mengubah makna “feminin” menjadi simbol kekuatan baru yakni kepemimpinan yang empatik, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan (Sastrawati, 2021).

Perempuan politisi kerap menghadapi dilema identitas antara peran sosial yang dilekatkan padanya sebagai perempuan dan tuntutan profesional sebagai politisi. Dalam konstruksi sosial yang masih patriarkal, perempuan diharapkan tetap menampilkan sisi lembut, penuh empati, dan tidak konfrontatif. Namun, di sisi lain, dunia politik sering kali menuntut karakter yang kuat, rasional, dan kompetitif karakter yang selama ini dilekatkan pada maskulinitas. Ketegangan antara dua identitas ini membuat perempuan politisi berada pada posisi yang sulit dalam menentukan bagaimana mereka harus menampilkan diri di ruang publik. Tekanan sosial dan ekspektasi budaya menempatkan perempuan pada standar ganda. Ketika seorang perempuan tampil tegas dan rasional, ia dianggap “terlalu maskulin” dan kehilangan sisi femininnya; sebaliknya, ketika ia menunjukkan kelembutan dan empati, ia dinilai “kurang kuat” untuk menjadi pemimpin. Standar ganda ini menciptakan hambatan simbolik yang membatasi ruang gerak perempuan dalam berkomunikasi politik. Mereka harus terus-menerus menavigasi antara menjadi “diri sendiri” dan menjadi “apa yang diterima publik.”

Beban ganda dalam komunikasi publik ini membuat perempuan sering kali terjebak dalam ruang penilaian yang tidak setara. Setiap ucapan, gestur, atau pilihan busana menjadi bagian dari penilaian terhadap kelayakan politiknya, sesuatu yang jarang dialami oleh politisi laki-laki. Situasi ini memperlihatkan bagaimana politik tidak hanya menjadi arena adu gagasan, tetapi juga arena pertarungan simbolik tentang gender dan identitas sosial. Dalam konteks ini, politik menjadi panggung di mana perempuan diuji bukan hanya oleh kemampuan, tetapi juga oleh citra diri yang harus sesuai dengan ekspektasi gender. Untuk menghadapi tantangan tersebut, banyak perempuan politisi mengembangkan strategi adaptif yang cermat, yakni dengan menyesuaikan gaya bicara agar tetap tegas tanpa dianggap agresif, memilih simbol-simbol yang merepresentasikan keibuan sekaligus ketegasan, dan menggunakan narasi empatik untuk menarik dukungan publik. Strategi ini bukan bentuk kepasrahan, melainkan cara kreatif dalam menegosiasikan identitas di tengah struktur politik yang maskulin. Dengan demikian, perjuangan perempuan dalam politik tidak hanya soal

meraih posisi kekuasaan, tetapi juga tentang merebut makna dan ruang dalam membentuk wacana kepemimpinan yang lebih inklusif.

#### IV SIMPULAN

Representasi perempuan dalam komunikasi politik menunjukkan bahwa politik tidak hanya berfungsi sebagai arena kekuasaan formal, tetapi juga sebagai ruang produksi makna yang membentuk cara publik memahami peran gender. Perempuan kerap dijadikan simbol kemajuan atau alat pencitraan partai politik tanpa diberi ruang substantif dalam pengambilan keputusan. Representasi yang bersifat tokenistik ini menegaskan bahwa kehadiran perempuan belum sepenuhnya mencerminkan transformasi struktur kekuasaan, melainkan masih berada dalam bayang-bayang dominasi patriarkal yang mengatur siapa yang berhak berbicara dan bagaimana perempuan seharusnya tampil di ruang publik. Dalam konteks komunikasi politik, relasi kekuasaan yang maskulin masih sangat kuat. Bahasa, simbol, dan narasi politik didominasi oleh nilai-nilai maskulinitas seperti rasionalitas, kekuatan, dan kompetisi, yang membuat perempuan harus bernegosiasi dengan identitas gendernya. Banyak perempuan politisi menghadapi dilema antara harus tampil tegas agar dianggap kompeten, namun tetap mempertahankan citra feminin agar diterima secara sosial. Di sinilah kekuasaan simbolik bekerja secara halus, membatasi ruang perempuan melalui mekanisme budaya dan komunikasi yang tampak wajar, tetapi sejatinya mempertahankan hierarki gender. Namun demikian, perempuan tidak hanya menjadi objek wacana, melainkan juga agen aktif yang berupaya membentuk ulang makna politiknya. Melalui media sosial dan strategi komunikasi alternatif, perempuan mulai merebut ruang narasi untuk menampilkan diri sebagai pemimpin yang empatik, cerdas, dan berdaya. Upaya ini menunjukkan bahwa representasi perempuan bersifat dinamis menjadi medan perebutan antara struktur patriarkal dan gerakan resistensi perempuan. Oleh karena itu, politik yang berkeadilan gender menuntut bukan sekadar keterwakilan jumlah, tetapi transformasi paradigma komunikasi politik menuju ruang yang lebih inklusif, egaliter, dan menghargai keberagaman identitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antari, L. P. S. (2023). Perempuan Dan Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1).  
<https://doi.org/10.47532/Jic.V6i1.798>
- Aula M Rizki. (2023). Isu-Isu Gender Dalam Keterwakilan (Ketimpangan Gender) Dalam Kehidupan Politik Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(3).
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesenjangan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Hawa*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/Hawapsga.V1i1.2233>
- Indrawan, J., Elfrita Barzah, R., & Simanihuruk, H. (2023). Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik Bagi Generasi Milenial. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/10.33822/Jep.V6i1.4519>
- Ma'mun, A. R. (2023). Problematika Komunikasi Politik Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1).  
<https://doi.org/10.22225/Politicos.3.1.2023.1-16>

- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(2). <https://doi.org/10.61083/Ebisma.V3i2.38>
- Munggaran, T. P. (2023). Peran Dan Pengaruh Perempuan Dalam Dinamika Politik Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7). <https://doi.org/10.59141/Jist.V4i7.653>
- Muzahid Akbar Hayat, Sjaiful Jayadiningrat, Gunawan Wibisono, & Muhammad Iwu Iyansyah. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1). <https://doi.org/10.36418/Jist.V2i1.61>
- Noor, N. N., Novianti, S., -, R., -, E., & Raudhia, S. (2022). Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sebagai Upaya Mengatasi Marginalisasi Gender Dalam Pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(1). <https://doi.org/10.35194/Jpphk.V12i1.1607>
- Noviasari, D. T. (2022). Keadilan Gender Di Tengah Perkembangan Politik Global Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law And Society Journal*, 1(4). <https://doi.org/10.31603/8358>
- Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan Dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi Pada Politisi Perempuan Di Banten. *Journal Of Political Issues*, 4(2). <https://doi.org/10.33019/Jpi.V4i2.81>
- Sastrawati, N. (2021). Peran Negara Dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender. *Jurnal Sipakalebbi*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/Jsipakallebbi.V5i1.21563>
- Setiawan, E. (2018). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Kancah Panggung Politik Di Indonesia. *Muwazah*, 10(1). <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V10i1.1337>
- Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.20414/Politea.V1i1.813>
- Yoteni, A. A., Nurlatifah, N. D., & Pramana, R. (2023). Peran Media Massa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Untuk Memperkuat Demokrasi Di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9). <https://doi.org/10.46799/Arl.V7i9.158>
- Zamroni, M. (2013). Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender. *Jurnal Dakwah*, 14(1).